

# **“Kontribusi Lintas Sektor Wujudkan Masa Depan Indonesia yang Berkelanjutan”**

---

**Amalia Adininggar Widyasanti**

**Plt Deputy Bidang Ekonomi/Staf Ahli Menteri Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas**

**Disampaikan pada Sustainability Day**  
Jakarta, 23 November 2020

# Program Pertumbuhan Hijau di Indonesia

Untuk mendukung Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi yang **inklusif secara sosial, menjaga keberlanjutan lingkungan** dan **menggunakan sumber daya dengan efisien**



Mewujudkan agenda prioritas nasional, komitmen global terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (*Nationally Determined Contributions/NDC*)



Membantu dalam mengakses dana serta membentuk sarana dan instrumen pendanaannya

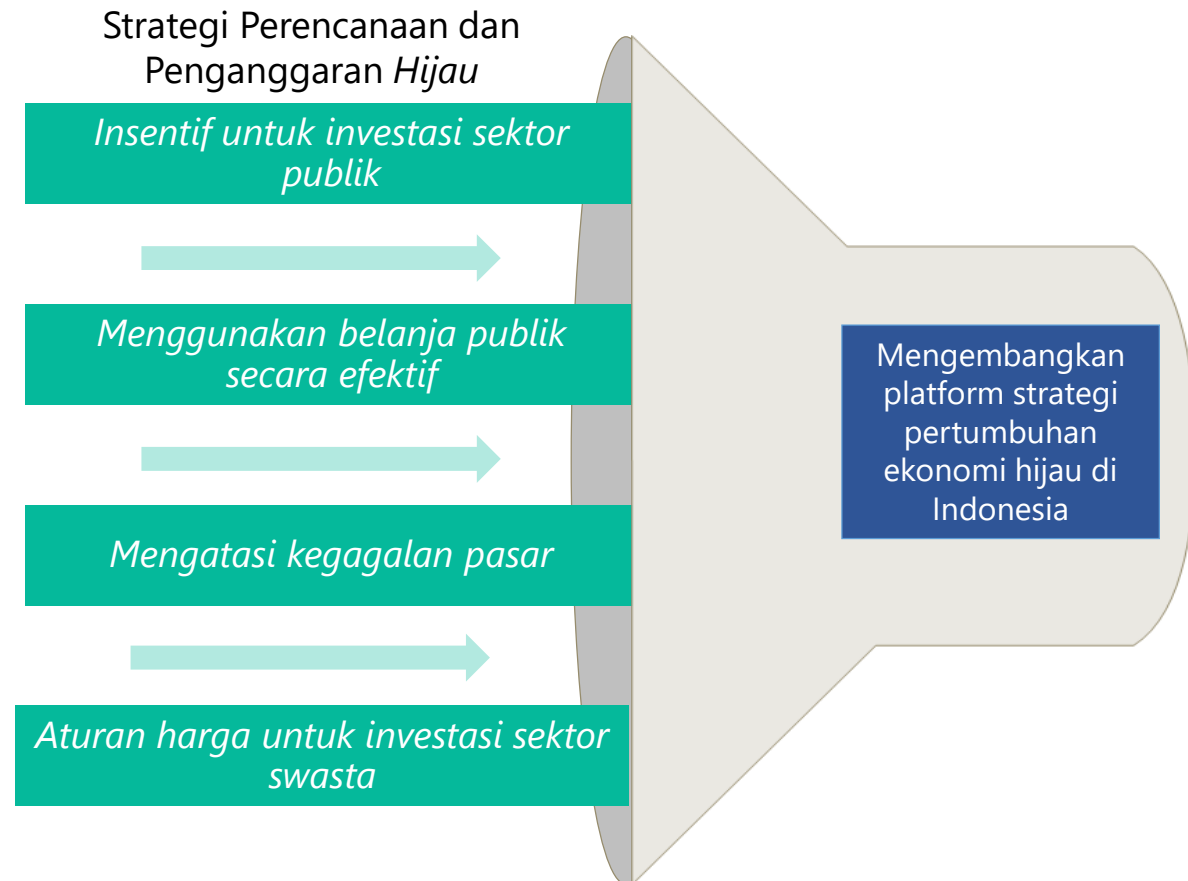


Menghasilkan pertumbuhan hijau, dengan mendorong investasi dan merancang proyek-proyek hijau yang memberikan manfaat sosial, lingkungan dan ekonomi

# Pengarusutamaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau ke dalam Kebijakan, Perencanaan, dan Investasi

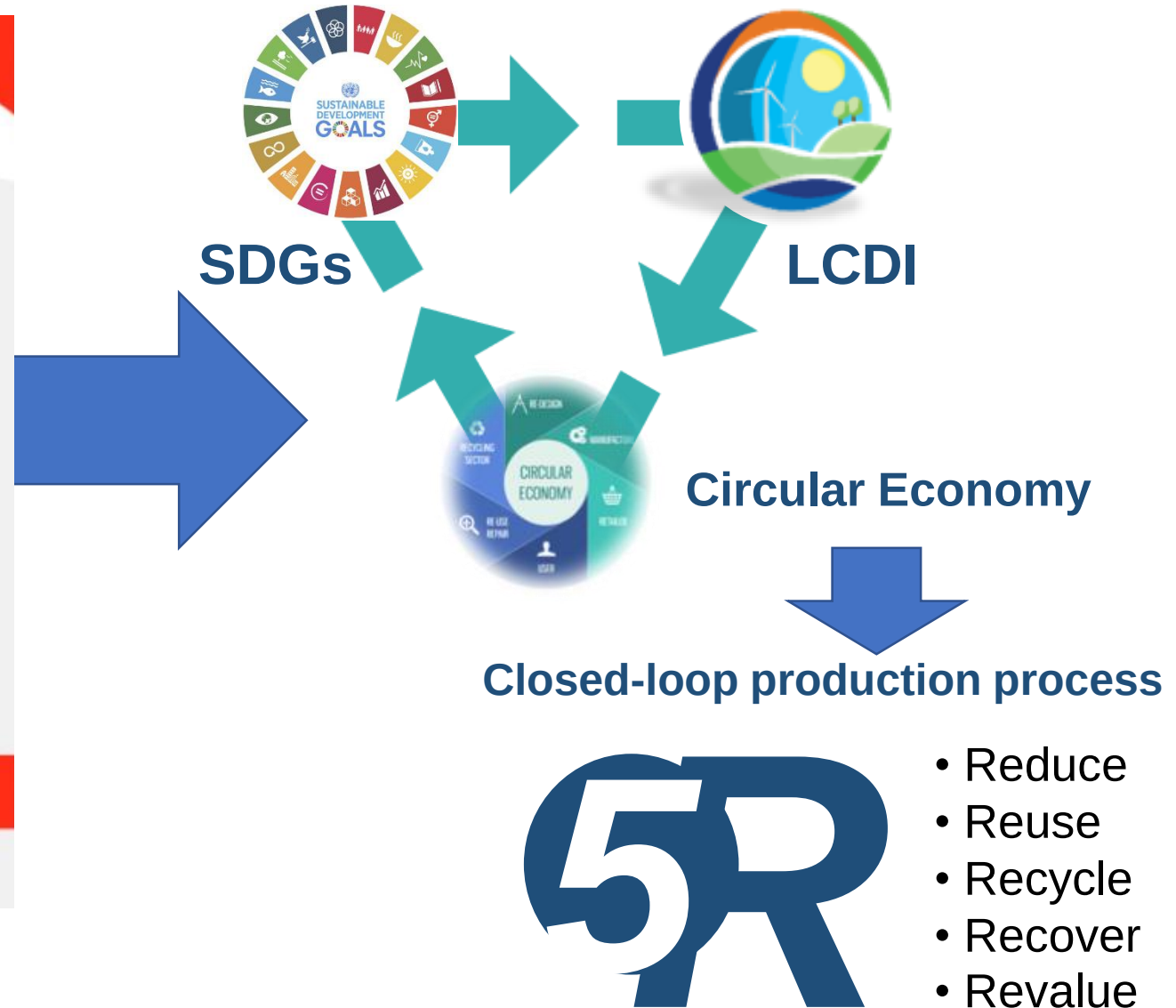
## Strategi menuju pertumbuhan ekonomi hijau nasional...

- Indonesia telah mengembangkan rencana aksi strategis nasional dan sub-nasional untuk perubahan iklim
- Beberapa kabupaten dan kota sedang menyusun strategi pertumbuhan ekonomi hijau dengan mengintegrasikan tujuan pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan
- Komitmen dan upaya sistematis diperlukan untuk mengarusutamakan prinsip dan pendekatan pertumbuhan ekonomi hijau ke dalam perencanaan dan investasi (eq. Perencanaan Penganggaran Hijau dari Depkeu)
- Replikasi dan *scaling up* menuju program percontohan



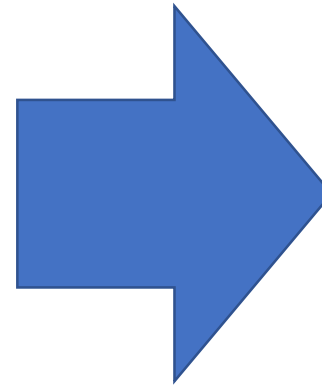


# KEBIJAKAN EKONOMI SIRKULAR





# EKONOMI SIRKULAR

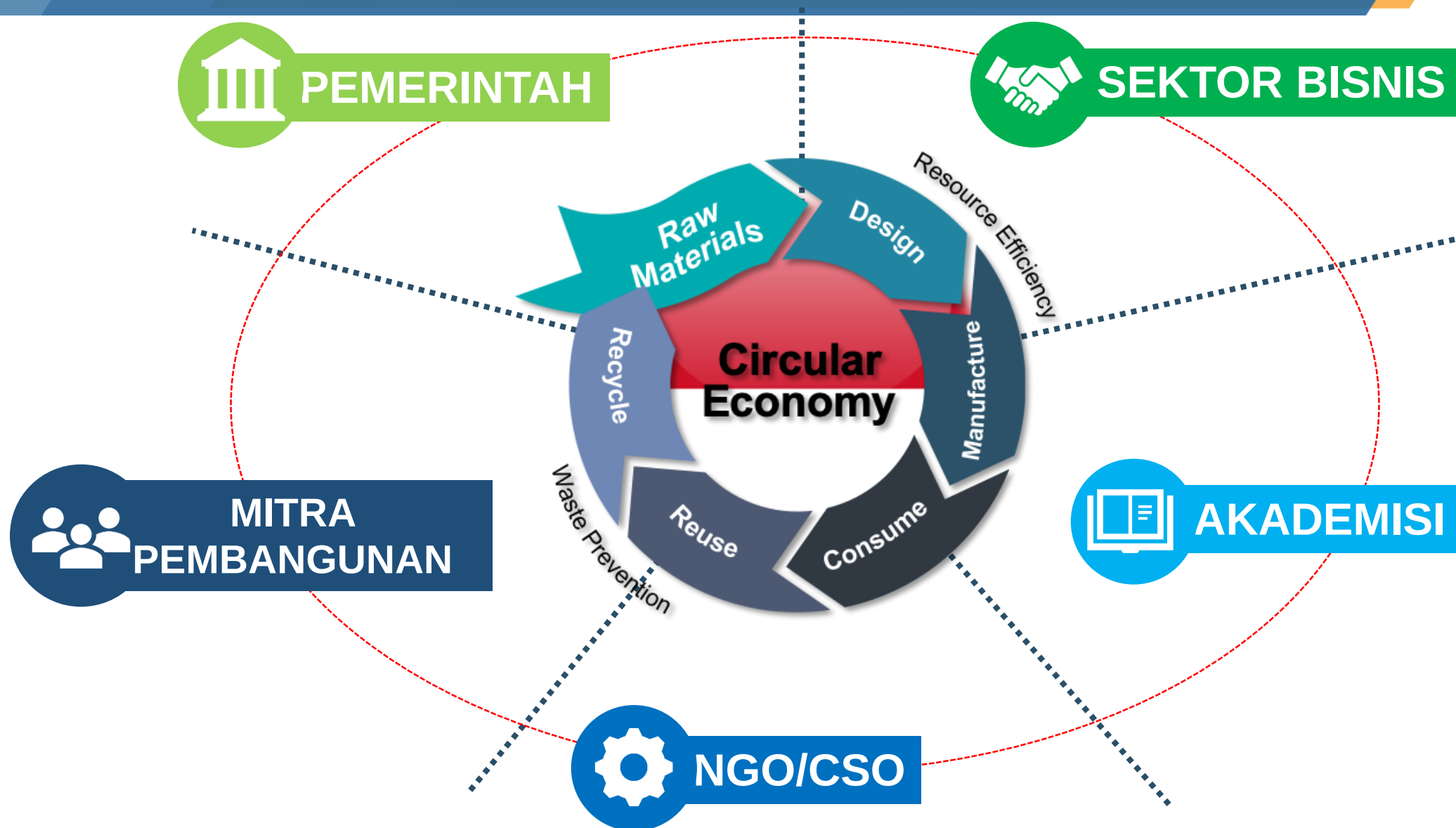


**Circular Economy** is an ideal concept that fits the narratives of achieving national economic growth targets and promoting environmental sustainability at the same time.





# KEMITRAAN EKONOMI SIRKULAR





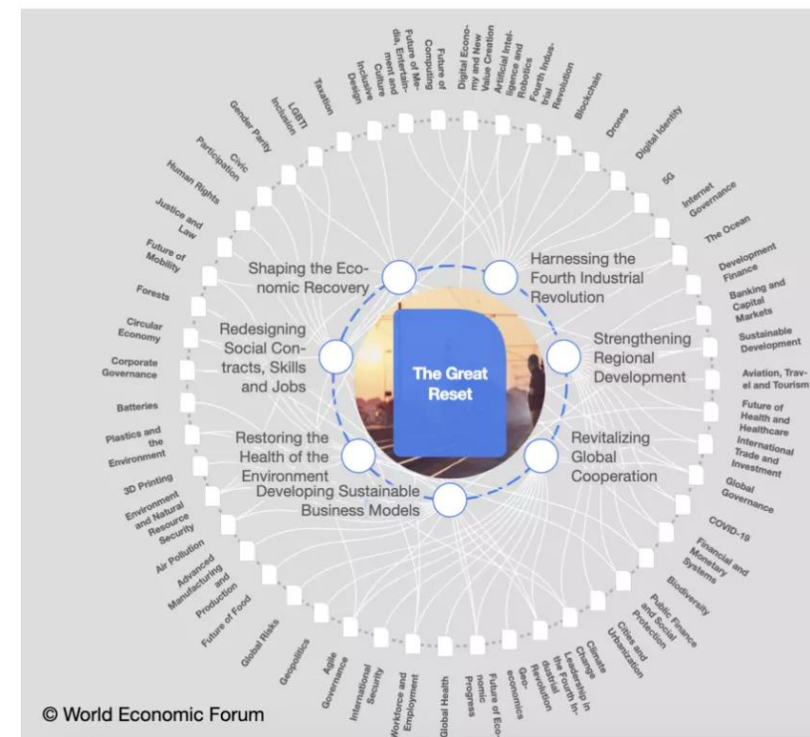
# The Great Reset

Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang menyeluruh, sehingga kebijakan pembangunan nasional harus melaksanakan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan pendekatan holistik.

Pendekatan "*New Normal*" setelah pandemic COVID-19 lebih mendekati istilah "*Great Reset*" dalam arti melakukan yang lebih baik. *Great Reset* diperkenalkan oleh Prof. Hart dalam Forum Ekonomi.

COVID-19 memberikan pelajaran bahwa penanganan dan pemulihan pasca COVID-19 harus dilaksanakan secara bersama dan inklusif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, seperti organisasi kemasyarakatan, filantropi, academia, sektor swasta dan pemerintah. Hal ini selaras dengan prinsip pelaksanaan SDGs.

**...Now is the time for a 'great reset'...**



Sumber: *World Economic Forum*



# Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021: Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial

## Kerangka Prioritas Nasional RKP 2021

Ditetapkan  
melalui Perpres  
No.86 Tahun  
2020

### PRIORITAS NASIONAL

1

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

2

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

3

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

4

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

5

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

6

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

7

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik



# FOKUS PEMBANGUNAN RKP 2021

## SASARAN

- Pertumbuhan industri pengolahan **4,7-5,5%**
- Kontribusi PDB industri pengolahan **19,6-19,8%**
- Pertumbuhan ekspor industri pengolahan **7,0-9,8%**



### Industri

- Devisa pariwisata **US\$ 4,8-8,5 miliar**
- Kontribusi PDB pariwisata **4,2%**



### Pariwisata

- Nilai realisasi PMA dan PMDN **Rp. 858,5 T**
- Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan **Rp. 268,7 T**
- **Termasuk potensi IKN**



### Investasi

## Pemulihan Ekonomi

## FOKUS



### Reformasi Sistem Kesehatan

- Bantuan pendidikan dokter spesialis (**3.000 orang**)
- Puskesmas dengan 9 jenis tenaga (**4.773 puskesmas**)
- Akreditasi internasional RS Rujukan Nasional (**12 RS**)
- Pengembangan sistem terpadu surveilans *real-time* (**34 provinsi**)
- Penambahan mesin TCM (**259 unit**)
- Introduksi vaksin PCV (**10 provinsi**)
- Penguatan *telemedicine* (**10 RS & 80 puskesmas**)



### Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

- Penurunan kemiskinan **0,53%**
- Kemiskinan ekstrim **3-3,5%**
- Akurasi data meningkat **50-70%**
- Di 2024 **konsolidasi bantuan dan jaminan sosial** diharapkan dapat mengentaskan pengangguran dan menghilangkan kemiskinan ekstrim melalui UMKM.



### Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

- Penguatan kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana
- Penguatan sistem tata kelola penanggulangan bencana
- Target investasi PRB meningkat bertahap **0,36 – 0,47 %** terhadap PDB
- Penurunan **51 potensi kerugian ekonomi 0,10 persen (PDB)**

## Reformasi

## Perkuatan

- Ketersediaan Beras **42,7 juta ton**
- Nilai Tukar Petani (NTP) **103**



### Ketahanan Pangan



### Peningkatan Kualitas Pendidikan

- Program Indonesia Pintar (**20 Juta Siswa**)\*
- KIP Kuliah dan Bidik Misi (**1 juta Mahasiswa**)\*
- Revitalisasi SMK dan PT Vokasi (**407 SMK dan 120 PT Vokasi**)
- Revitalisasi Gedung Perguruan Tinggi (**11 PTN & 8 Poltek**)
- DAK Fisik Pendidikan (**±23.016 Satuan Pendidikan**)
- Pelatihan Guru (**50.709 Orang**)

\*Kemdikbud dan Kemenag

## SASARAN



# KERJASAMA BAPPENAS – UNILEVER UNTUK PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA



## NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

### ANTARA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

### DAN

PT. UNILEVER INDONESIA, TBK.

### TENTANG

KERJA SAMA UNTUK PERCEPATAN PENCAPAIAN  
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

NOMOR: NKB 04/D.3/10/2019

NOMOR: JKR/19/083

Pada hari ini, Rabu tanggal sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I **Arifin Rudiyanto** : dalam jabatan selaku Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berkedudukan di Jalan Taman Suropati No.2, Jakarta Pusat 10310, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II **Maria Dewantini Dwianto** : dalam jabatannya selaku Kuasa Direksi PT. Unilever Indonesia Tbk, berdasarkan kuasa tertanggal 4 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sancoyo Antarikso dan Enny Hartarti selaku Direksi PT. Unilever Indonesia Tbk, dan oleh karenanya sah dan berwenang serta bertindak untuk dan atas nama PT Unilever Indonesia, Tbk, berkedudukan di Grha Unilever, Green Office Park Kav. 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang 13545, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut “**Kementerian PPN/Bappenas**” melaksanakan tugas dan fungsi koordinator pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang selanjutnya disebut “**TPB**” di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- bahwa PT. Unilever Indonesia, Tbk adalah perusahaan yang berkomitmen untuk mendukung program Pemerintah dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Kesepahaman** ini, mencakup upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditekankan, pada upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia yang meliputi:

- Bidang kesehatan dan gizi guna mencapai:
  - Tujuan 2, Tanpa Kelaparan;
  - Tujuan 3, Kehidupan Sehat dan Sejahtera; dan
  - Tujuan 6, Air Bersih dan Sanitasi Layak.
- Bidang pendidikan guna mencapai Tujuan 4, Pendidikan Berkualitas;
- Bidang pemberdayaan perempuan guna mencapai Tujuan 5, Kesetaraan Gender
- Bidang lingkungan guna mencapai:
  - Tujuan 12, Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
  - Tujuan 13, Penanganan Perubahan Iklim; dan
  - Tujuan 14, yaitu Ekosistem Lautan.



**Terima Kasih!**

---